



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si**  
**Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**  
**Jabatan : BUPATI PESISIR SELATAN**

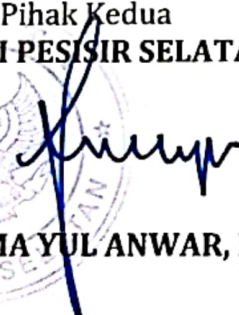
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 20 Januari 2025

Pihak Kedua  
**BUPATI PESISIR SELATAN**



**(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)**

Pihak Pertama  
**KEPALA DINAS SOSIAL, PPr PA  
KAB. PESISIR SELATAN**



**(WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si)**  
**NIP. 19830119 2001121003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81)
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	87%
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	57,04%
4.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	0,033
5.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100

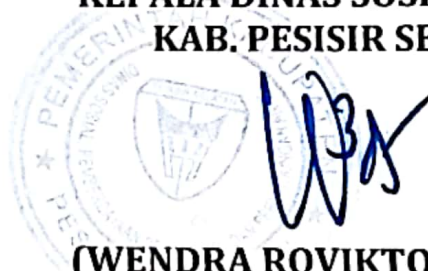
No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.046.226.762,00-
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 926.422.290,00-
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 463.987.797,00-
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 104.964.610,00-
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 54.995.690,00-
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 16.000.000,00-
7.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 481.999.716,00-
8.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 174.804.837,00-
9.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 2.520.986.345,00-
10.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 15.019.907,00-

11.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 20.000.005,00-
12.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 254.849.931,00-
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 9.080.257.889,00-</b>

Painan, 20 Januari 2025

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS SOSIAL, PPprPA  
KAB. PESISIR SELATAN**

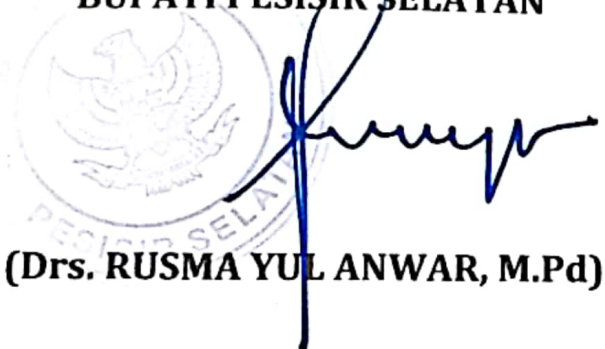


**(WENDRA ROVIKTO, S STP, M.Si)**

**NIP. 19830119 2001121003**

Pihak Kedua

**BUPATI PESISIR SELATAN**



**(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : IRWAN FAHLIFI, S.H**  
**Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si.**  
**Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua**  
**Kepala Dinas Sosial, PprPA**  
**Kab. Pesisir Selatan**

**WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si**  
**NIP.19830119 200112 1 003**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Sekretaris Dinas Sosial, PprPA**  
**Kab. Pesisir Selatan**

**IRWAN FAHLIFI, S.H**  
**NIP. 19690126 199403 1 002**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja</b>		
	- Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	- Tersedianya alat logistik kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen
	- Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	- Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	- Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit
	- Terlaksananya pengadaan mebel	- Jumlah Peket Mebel yang disediakan	1 Paket
	- Tersedianya Peralatan dan	- Jumlah paket peralatan	1 Paket

	perlengkapan kantor	dan perlengkapan kantor yang disediakan	
	- Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah</b>		
	- Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
	- Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen

No	Program	Anggaran
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Rp. 431.143.008</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 22.145.917</b>
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 22.145.917
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 80.062.746</b>
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 80.062.746
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 205.496.345</b>
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.809.512
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 5.100.000
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 4.998.463
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 4.072.530
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.128.400.840
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 60.115.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 14.985.000</b>
9.	Pengadaan Mebel	Rp. 14.985.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 103.920.000</b>
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 43.920.000
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 60.000.000

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 4.533.000</b>
12.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 2.550.000
13.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainny	Rp. 1.983.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. . 431.143.008</b>

**Pihak Kedua**  
**Kepala Dinas Sosial,PprPA**  
**Kab. Pesisir Selatan**



**WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si**  
**NIP.19830119 200112 1 003**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Sekretaris Dinas Sosial,PprPA**  
**Kab. Pesisir Selatan**



**IRWAN EAHLIFL S.H**  
**NIP. 19690126 199403 1 002**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

**Nama : HARTETI, S.H.**  
**Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : IRWAN FAHLIFI, SH**  
**Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**  
**Sekretaris Dinas Sosial, PPrPA**  
**Kab. Pesisir Selatan**

  
**IRWAN FAHLIFI, S.H**  
**NIP. 19690126 199403 1 002**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Kasubag Umum dan Kepegawaian**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

  
**HARTETI, SH**  
**NIP. 19730302 200701 2 012**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
<b>1.</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Perkantoran</b>		
	- Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah..	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12
	- Tersedianya Gaji, Tunjangan ASN dan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30
	- Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12
	- Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
	- Tersedianya peralatan gedung kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
	- Tersedianya alat logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4
	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4
	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3
	- Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
	- Tersedianya Mebel Kantor	Jumlah Paket Mebel Kantor yang disediakan	1
	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12

- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1
- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12

No	Program / Kegiatan	Anggaran
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp. 4.046.226.761,50</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 22.145.917,50</b>
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 22.145.917,50
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 3.559.571.500,00</b>
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.479.508.754,00
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 80.062.746,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 205.496.345,00</b>
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.809.512,00
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 5.100.000,00
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 4.998.463,00
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 4.072.530,00
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp .128.400.840,00
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 60.115.000,00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 14.985.000,00</b>
10.	Pengadaan Mebel	Rp. 14.985.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 103.920.000,00</b>

11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 43.920.000,00
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 60.000.000,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 140.108.000,00</b>
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 59.190.000,00
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 76.385.000,00
15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 2.550.000,00
	Total	<b>Rp. 4.046.226.761,50</b>

**Pihak Kedua**  
**Sekretaris Dinas Sosial, PPrPA**  
**Kab. Pesisir Selatan**



**IRWAN FAHLI, S.H**

**NIP. 19690126 199403 1 002**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Kasubag Umum dan Kepegawaian**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

**HARTETI, S.H**  
**NIP. 19730302 200701 2 012**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : RIZA NELVI, S.H**  
**Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan**

Selanjutnya disebut pihak pertama


**Nama : AFRIDA, S.H.**  
**Jabatan : Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**  
**Kabid Pemberdayaan & Rehab. Sosial**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

  
**AFRIDA, S.H.**  
**NIP. 19700131 198903 2 001**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Penelaah Teknis Kebijakan**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

  
**RIZA NELVI, S.H**  
**NIP. 19790813 200701 2 005**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyusun rencana kegiatan pada bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Tersedianya KAK dan PO pada bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	12 bln
2.	Mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan pada bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Dokumen pelaksanaan kegiatan	12 bln
3.	Menyiapkan administrasi penilaian pilar-pilar sosial.	Dokumen penilaian pilar-pilar sosial	3 bln
4.	Melaksanakan verifikasi dan validasi data Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya verifikasi dan validasi data pada Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	12 bln
5.	Membuat laporan hasil kegiatan berdasarkan tupoksi kepada atasan	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan	12 bln

**Pihak Kedua**  
**Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

**AFRIDA, S. H.**

NIP. 19700131198903 2 001

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Penelaah Teknis Kebijakan**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

**RIZA NELVI, S.H.**

NIP. 19790813 200701 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama** : SRI RAHAYU, S.E.,M.M  
**Jabatan** : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama** : HARTETI, SH  
**Jabatan** : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua  
Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

**HARTETI, SH**  
NIP. 19730302 200701 2 012

**Painan, 30 Januari 2025  
Pihak Pertama  
Penelaah Teknis Kebijakan  
Dinas Sosial, PprPA Kab. Pesisir Selatan**

**SRI RAHAYU, S.E.,M.M.**  
NIP. 19791119 200604 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membantu mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian	Dokumen kepegawaian	12 bln
2.	Membantu menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, karis, karsu dan askes	Dokumen usulan naik pangkat, gaji berkala, karis, karsu dan askes	12 bln
3.	Membantu menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK) dan mengkoordinir serta menghimpun Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Dokumen mutasi, teguran, pensiun, surat cuti pegawai, DUK dan SKP	12 bln
4.	Mengetik mengkonsep surat dan naskah dinas serta mendistribusikan sesuai dengan disposisi dan arahan atasan.	Dokumen naskah surat dinas	12 bln
5.	Menyusun laporan secara berkala	Dokumen laporan harian	12 bln

**Pihak Kedua**  
**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir**  
**Selatan**



**HARTETI, SH**  
**NIP. 19730302 200701 2 012**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Penelaah Teknis Kebijakan**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**



**SRI RAHAYU, S.E., M.M.**  
**NIP. 19791119 200604 2 009**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : HILDA RULFIZA**  
**Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : HARTETI, SH**  
**Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**  
**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

  
**HARTETI, SH**

**NIP. 19730302 200701 2 012**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Pengadministrasian Perkantoran**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

  
**HILDA RULFIZA**

**NIP. 19671218 199212 2 001**


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

No (1)	Sasaran Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Membantu mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian	Dokumen kepegawaian	12 bln
2.	Membantu menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, karis, karsu dan askes	Dokumen usulan naik pangkat, gaji berkala, karis, karsu dan askes	12 bln
3.	Membantu menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK) dan mengkoordinir serta menghimpun Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Dokumen mutasi, teguran, pensiun, surat cuti pegawai, DUK dan SKP	12 bln
4.	Mengetik mengkonsep surat dan naskah dinas serta mendistribusikan sesuai dengan disposisi dan arahan atasan.	Dokumen naskah surat dinas	12 bln
5.	Menyusun laporan secara berkala	Dokumen laporan harian	12 bln

**Pihak Kedua  
Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir  
Selatan**

  
**HARTETI, SH**  
NIP. 19730302 200701 2 012

**Painan, 30 Januari 2025  
Pihak Pertama  
Pengadministrasian Perkantoran  
Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

  
**HINDA RULFIZA**  
NIP. 19671218 199212 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : WIDYA OKTRA, S.AP**  
**Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : IRWAN FAHLIFI, SH**  
**Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

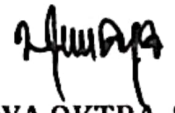
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**  
**Sekretaris**  
**Dinas Sosial, PPrPA**  
**Kab. Pesisir Selatan**

  
**IRWAN FAHLIFI, SH**  
**NIP. 19690126 199403 1 002**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Penelaah Teknis Kebijakan**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab.Pesisir Selatan**

  
**WIDYA OKTRA, S.AP**  
**NIP. 19921019 201903 2 003**

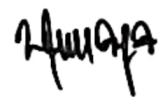
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

No (1)	Sasaran Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedia Dokumen SPP dan SPM Gaji Pegawai	Dokumen pengajuan pembayaran gaji pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12 bln
2.	Tersedianya SP2D UP, GU, TU	Dokumen permintaan UP, GU dan TU untuk kebutuhan-kebutuhan dinas dan mengkoreksi laporan SPJ keuangan setiap bulan	12 bln
3.	Tersedianya kelengkapan dokumen usulan pembayaran gaji	Dokumen kelengkapan daftar gaji, tunjangan dan rapel yang akan dibayarkan	12 bln
4.	Tersedia Dokumen laporan harian pelaksanaan tugas	Dokumen Laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas	12 bln

**Pihak Kedua**  
**Sekretaris**  
**Dinas Sosial, PprPA**  
**Kab. Pesisir Selatan**

  
**IRWAN FAHLIFL, SH**  
**NIP. 19690126 199403 1 002**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Penelaah Teknis Kebijakan**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

  
**WIDYA OKTRA, S.AP**  
**NIP. 19921019 201903 2 003**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : DENI RAHMAN, S.AP**  
**Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : IRWAN FAHLIFI, S.H**  
**Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua  
Sekretaris  
Dinas Sosial, PPrPA  
Kab. Pesisir Selatan**

  
**IRWAN FAHLIFI, S.H**

**NIP. 19690126 199403 1 002**

**Painan, 30 Januari 2025  
Pihak Pertama  
Penelaah Teknis Kebijakan  
Dinas Sosial, PPrPA  
Kab. Pesisir Selatan**

  
**DENI RAHMAN, S.AP**  
**NIP. 19870821201903 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen SPP dan SPM LS dan GU Kegiatan	Dokumen SPP dan SPM LS dan GU Kegiatan	12 bln
2.	Tersedianya Laporan SPJ Sub Kegiatan	Dokumen transfer SPJ Belanja non tunai kegiatan masing-masing bidang sesuai jumlah tagihan yang telah disetujui atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas	12 bln
3.	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	12 bln

Pihak Kedua  
Sekretaris  
Dinas Sosial, PPrPA  
Kab. Pesisir Selatan



**(IRWAN FAHLI, S.H)**  
NIP. 19690126 199403 1 002

Painan, 30 Januari 2025  
Pihak Pertama  
Penelaah Teknis Kebijakan  
Dinas Sosial, PPrPA  
Kab. Pesisir Selatan



**DENI RAHMAN, S.AP**  
NIP. 19870821 201903 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : AFRIDA, S.H.**  
**Jabatan : Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si**  
**Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua**  
**Kepala Dinas Sosial, PprPA**  
**Kab. Pesisir Selatan**

**WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si**  
**NIP. 19830119 200112 1 003**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Kabid Pemberdayaan & Rehab. Sosial**  
**Dinas Sosial, PprPA**  
**Kab. Pesisir Selatan**

**AFRIDA, S.H.**  
**NIP. 19700131 198903 2 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat</b>		
	-Terlaksananya Penyediaan Alat Bantu	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang
	-Terlaksananya Penyediaan Sandang	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Penyediaan Sandang	60 orang
	-Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandang Pengemis dan Masyarakat	- Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandang Pengemis dan Masyarakat	65 orang
	-Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang
	-Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	195 orang
	-Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang
	-Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 LKS

- Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 makam
---	---	---------

No	Program	Anggaran
1.	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	Rp. 926.422.567
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp. 926.422.567
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 877.500.000
2.	Penyediaan sandang	Rp. 277
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 48.922.290
2.	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	Rp. 443.987.520
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Rp. 443.987.520
4.	Penyediaan Sandang	Rp. 277
5.	Penyediaan Alat Bantu	Rp. 38.989.760
6.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 4.997.760
7.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandang Pengemis dan Masyarakat	Rp. 400.000.000
3.	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	Rp. 16.000.000
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Rp. 16.000.000
8.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Rp. 16.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.386.410.087</b>

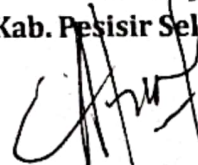
Pihak Kedua  
Kepala Dinas Sosial, PprPA  
Kab. Pesisir Selatan



**WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003

Painan, 30 Januari 2025

Pihak Pertama  
Kabid Pemberdayaan & Rehab. Sosial  
Dinas Sosial, PprPA  
Kab. Pesisir Selatan



**AFRIDA.S.H**  
NIP. 19700131 198903 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN PESIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : MUSTIPAL, S.Sos**  
**Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : AFRIDA, S.H.**  
**Jabatan : Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Painan, 30 Januari 2025**

**Pihak Kedua**  
**Kabid Pemberdayaan & Rehab. Sosial**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

**AFRIDA, S.H.**  
**NIP. 19700131 198903 2 001**

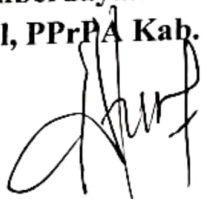
**Pihak Pertama**  
**Penelaah Teknis Kebijakan**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

**MUSTIPAL, S.Sos**  
**NIP. 19881011 202203 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

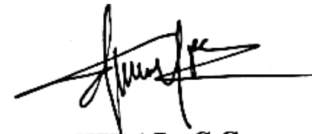
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membantu menyiapkan data orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang ada Kabupaten Pesisir Selatan	Data ODGJ Kab. Pesisir Selatan	12 bln
2.	Membantu melakukan pendataan Disabilitas	Data Disabilitas Kabupaten Pesisir Selatan	12 bln
3	Menyusun Evaluasi RKPD, LKPj, LPPD dan LKj PD	Dokumen LKPj, LPPD dan LKJ PD	3 bln
4	Menyusun Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan Keuangan	Dokumen Laporan Bulanan dan Laporan Keuangan PD	12 bln

**Pihak Kedua**  
**Kabid Pemberdayaan & Rehab. Sosial**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**



**AFRIDA, SH**  
**NIP. 19700131 198903 2 001**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Penelaah Teknis Kebijakan**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**



**MUSTIPAL, S.Sos**  
**NIP. 19881011 202203 1 001**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : IRMA YENNI**  
**Jabatan : Pengadministrasian Perkantoran**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : AFRIDA, SH**  
**Jabatan : Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Painan, 30 Januari 2025**

**Pihak Kedua**  
**Kabid Pemberdayaan dan Rehab. Sosial**  
**Dinas Sosial, PPrBA Kab Pesisir Selatan**

**AFRIDA, SH**

**NIP. 19700131 198903 2 001**

**Pihak Pertama**  
**Pengadministrasian Perkantoran**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab.Pesisir Selatan**

**IRMA YENNI**

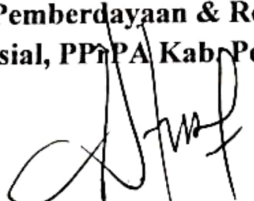
**NIP. 19770715 200701 2 006**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membantu KAK dan petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Dokumen KAK bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	12 bln
2.	Membantu menyiapkan data orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang ada Kabupaten Pesisir Selatan	Data ODGJ Kab. Pesisir Selatan	12 bln
3.	Membantu melakukan pendataan Disabilitas	Data Disabilitas Kabupaten Pesisir Selatan	12 bln
4.	Membantu melakukan pemberian bantuan transportasi bagi orang terlantar dan orang gila terlantar	Dokumen SPJ transpor OT dan ODGJ terlantar	12 bln
5.	Menyusun laporan hasil kegiatan bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Laporan kegiatan bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	12 bln

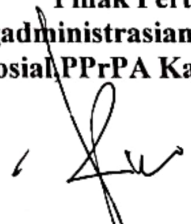
Painan, 30 Januari 2025

**Pihak Kedua**  
**Kabid Pemberdayaan & Rehab. Sosial**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**



**AFRIDA, SH**  
**NIP. 19700131 198903 2 001**

**Pihak Pertama**  
**Pengadministrasian Perkantoran**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**



**IRMA YENNI**  
**NIP. 19770715 200701 2 006**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : JUNAIDI, S. Kom., M.E**  
**Jabatan : Kabid. Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangan Fakir Miskin**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si**  
**Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**  
**Kepala Dinas Sosial, PPr PA**  
**Kab. Pesisir Selatan**

**WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19830119 200112 1 003**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Kabid Perlindungan, Jamsos**  
**& Penanganan Fakir Miskin**  
**Dinsos, PPrPA**  
**Kab. Pesisir Selatan**

**(JUNAIIDI, S. Kom., M.E)**  
**NIP. 19700609 199703 1 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat</b>		
	- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	- Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	250 Keluarga
	- Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Keluarga	- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.623 Keluarga
	- Penyediaan Makanan Logistik Bencana	- Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Makanan Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang
	- Pemberian Pelayanan Psikososial Korban Bencana	- Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang

No	Program	Anggaran
1.	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Rp. 104.964.610</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 104.964.610</b>
1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 42.339.180
2.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp. 62.625.430
2.	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Rp. 54.995.690</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan</b>	<b>Rp. 54.995.690</b>

	Sosial Kabupaten/Kota	
3.	Penyediaan Makanan	Rp. 25.000.000
4.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp. 29.995.690
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 159.960.300</b>

**Pihak Kedua**  
**Kepala Dinas Sosial, PPr PA**  
**Kab. Pesisir Selatan**



**(WENDRA ROVIKTO, S. STP., M.Si)**  
**NIP. 19830119 200112 1 003**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Kabid Perlindungan, Jamsos**  
**& Penanganan Fakir Miskin**  
**Dinsos, PprPA Kab. Pesisir Selatan**



**(JUNAI DI, S. Kom., M.E)**  
**NIP. 19700609 199703 1 002**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : MERRY ILDIAWATI, S. AP**  
**Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : JUNAIDI, S. Kom., M.E**  
**Jabatan : Kabid. Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangan Fakir Miskin**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**  
**Kabid. Perlindungan, Jaminan Sosial dan**  
**Penangan Fakir Miskin**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

**JUNAIIDI, S. Kom., M.E**  
**NIP. 19700609 199703 1 002**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Penetaah Teknis Kebijakan**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

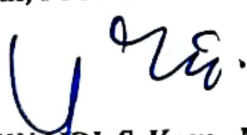
**MERRY ILDIAWATI, S.AP**  
**NIP. 19950522 201903 2 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**


No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Tersedianya KAK dan PO pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	4 sub kegiatan
2.	Mengidentifikasi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan daerah	Tersedianya data penerima PBI APBD dan PBI APBN	15 kecamatan
3.	Menyelenggarakan sistem informasi kesejahteraan sosial	Terselenggaranya pengolahan data pada aplikasi SIKS-NG	12 bln
4.	Melaksanakan verifikasi dan validasi data pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Terlaksananya verifikasi dan validasi data penanganan fakir miskin	15 kecamatan
5.	Membuat laporan hasil kegiatan berdasarkan tupoksi kepada atasan	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan	12 bln

Painan, 30 Januari 2025

**Pihak Kedua**  
Kabid. Perlindungan, Jaminan Sosial dan  
Penangan Fakir Miskin  
Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan

  
**IUNAI DI S. Kom., M.E**  
NIP. 19700609 199703 1 002

**Pihak Pertama**  
Penelaah Teknis Kebijakan  
Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan

  
**MERRY ILDIAWATI S.AP**  
NIP. 19950522 201903 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : RESRINA SARI, S.ST**  
**Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

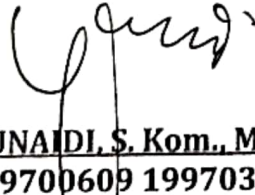
**Nama : JUNAIDI, S. Kom., M.E**  
**Jabatan : Kabid. Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangan Fakir Miskin**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**  
**Kabid. Perlindungan, Jaminan Sosial dan**  
**Penangan Fakir Miskin**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

  
**JUNAIIDI, S. Kom., M.E**  
**NIP. 19700609 199703 1 002**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Penetaah Teknis Kebijakan**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

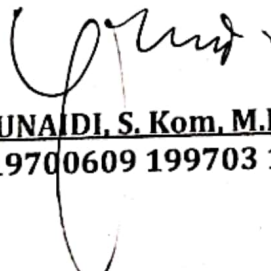
  
**RESRINA SARI, S.ST**  
**NIP. 19880814201001 2 005**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**


No (1)	Sasaran Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Tersedianya KAK dan PO pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	4 sub kegiatan
2.	Mengidentifikasi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan daerah	Tersedianya data penerima PBI APBD dan PBI APBN	15 kecamatan
3.	Menyelenggarakan sistem informasi kesejahteraan sosial	Terselenggaranya pengolahan data pada aplikasi SIKS-NG	12 bln
4.	Melaksanakan verifikasi dan validasi data pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Terlaksananya verifikasi dan validasi data penanganan fakir miskin	15 kecamatan
5.	Membuat laporan hasil kegiatan berdasarkan tupoksi kepada atasan	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan	12 bln

Painan, 30 Januari 2025

**Pihak Kedua**  
**Kabid. Perlindungan, Jaminan Sosial dan**  
**Penangan Fakir Miskin**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

  
**IUNAJDI, S. Kom, M.E**  
**NIP. 19700609 199703 1 002**

**Pihak Pertama**  
**Penelaah Teknis Kebijakan**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

  
**RESRINA SARI, S.ST**  
**NIP. 19880814201001 2 005**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : WARNI WAHYUNI, A.Md.Keb**  
**Jabatan : Pengolah Data**

Selanjutnya disebut pihak pertama

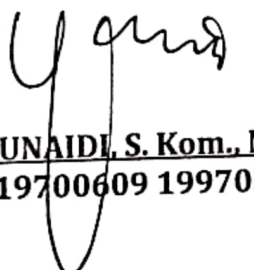
**Nama : JUNAIDI, S. Kom., M.E**  
**Jabatan : Kabid. Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangan Fakir Miskin**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**  
**Kabid. Perlindungan, Jaminan Sosial dan**  
**Penangan Fakir Miskin**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

  
**JUNAIDI, S. Kom., M.E**  
**NIP. 19700609 199703 1 002**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Pengola Data**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

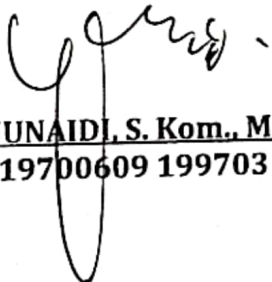
  
**WARNI WAHYUNI, A.Md.Keb**  
**NIP. 19910620 201502 2 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**


No (1)	Sasaran Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Tersedianya KAK dan PO pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	4 sub kegiatan
2.	Mengidentifikasi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan daerah	Tersedianya data penerima PBI APBD dan PBI APBN	15 kecamatan
3.	Menyelenggarakan sistem informasi kesejahteraan sosial	Terselenggaranya pengolahan data pada aplikasi SIKS-NG	12 bln
4.	Melaksanakan verifikasi dan validasi data pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Terlaksananya verifikasi dan validasi data penanganan fakir miskin	15 kecamatan
5.	Membuat laporan hasil kegiatan berdasarkan tupoksi kepada atasan	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan	12 bln

Painan, 30 Januari 2025

**Pihak Kedua**  
**Kabid. Perlindungan, Jaminan Sosial dan**  
**Penangan Fakir Miskin**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

  
**JUNAI DI, S. Kom., M.E**  
**NIP. 19700609 199703 1 002**

**Pihak Pertama**  
**Pengola Data**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

  
**WARNI WAHYUNI, A. Md. Keb**  
**NIP. 19910620 201502 2 001**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : HENGKI PRATAMA PUTRA**  
**Jabatan : Pengadministrasian Teknis Kebijakan**

Selanjutnya disebut pihak pertama


**Nama : JUNAIDI, S.Kom., M.E**  
**Jabatan : Kabid. Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangan Fakir Miskin**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua**  
**Kabid. Perlindungan, Jaminan Sosial dan**  
**Penangan Fakir Miskin**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

  
**JUNAIIDI, S. Kom., M.E**  
**NIP. 19700609 199703 1002**

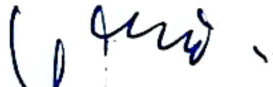
**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Pengadministrasian Teknis Kebijakan**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

  
**HENGKI PRATAMA PUTRA**  
**NIP. 19851219 201407 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyusun rencana kegiatan pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Tersedianya dokumen KAK dan PO pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	12 bln
2.	Membantu proses penyaluran bantuan sosial dan jaminan sosial	Terdistribusinya pemberian bantuan dan jaminan sosial	12 bln
3.	Memonitoring dan evaluasi bantuan dan jaminan sosial pada masyarakat penerima manfaat.	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	12 bln
4.	Membuat laporan hasil kegiatan berdasarkan tupoksi kepada atasan	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan	12 bln

**Pihak Kedua**  
**Kabid Perlindungan, Jamsos**  
**& Penanganan Fakir Miskin**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**



**JUNAIDI, S. Kom., M.E**  
**NIP. 19700609 199703 1 002**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Pengadministrasian Teknis Kebijakan**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir-Selatan**



**HENGKI PRATAMA PUTRA**  
**NIP. 19851219 201407 1 003**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : RIRI LOVITA, S. SiT**  
**Jabatan : Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si**  
**Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**  
**Kepala Dinas Sosial, PprPA**  
**Kab. Pesisir Selatan**

**WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si**  
**NIP. 19830119 200112 1 003**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Kabid PPr PA**  
**Dinas Sosial, PprPA**  
**Kab. Pesisir Selatan**

**RIRI LOVITA, S. SiT**  
**NIP. 19800106 200312 2 002**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri</b>		
	- Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen
	- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen
	- Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 dokumen
	- Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi
	- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen
	- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	80 Orang

	- Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program / kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang diperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program / kegiatan pencegahan KTA	299 Orang
	- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang Terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	80 orang
<b>2.</b>	<b>Terwujudnya Keluarga Bahagia</b>		
	- Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	16 Organisasi
	- Terlaksananya Pengembangan Kegiatan masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen
	- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	20 orang

No.	Program	Anggaran
1.	<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>Rp. 481.999.716,00</b>
	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 40.000.000,00</b>
1.	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp. 40.000.000,00
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 242.000.002,00</b>
2.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp. 12.000.000,00
3.	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hokum, sosial dan ekonomi	Rp. 230.000.002,00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kabupaten /Kota</b>	<b>Rp. 199.999.714,00</b>
4	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 199.999.714,00
2.	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>Rp. 174.804.837,00</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 59.745.000,00</b>
5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 59.745.000,00
	<b>Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota</b>	<b>Rp. 80.549.900,00</b>
6.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Rp. 80.549.900,00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 34.509.937,00</b>

7.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 34.509.937,00
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>Rp. 2.520.985.345,00</b>
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp. 2.125.559.440,00
8.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 2.125.559.440,00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 395.426.905,00</b>
9.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Rp. 395.426.905,00</b>
<b>4.</b>	<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>	<b>Rp. 15.019.907,00</b>
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 15.019.907,00</b>
10.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 15.019.907,00
<b>5.</b>	<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	<b>Rp. 20.000.004,50</b>
	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 20.000.004,50</b>
11.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 20.000.004,50
<b>6.</b>	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Rp. 254.849.931,00</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 50.750.000,00</b>
12.	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Rp. 50.750.000,00

	<b>Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah/Kabupaten</b>	<b>Rp. 169.590.000,00</b>
13.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp. 169.590.000,00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 34.509.931,00</b>
14.	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Rp. 34.509.931,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 3.467.659.741,00</b>

**Painan, 30 Januari 2025**

**Pihak Kedua**

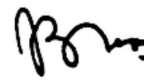
**Kepala Dinas Sosial, PprPA  
Kab. Pesisir Selatan**



**WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si  
NIP. 19830119 200112 1 003**

**Pihak Pertama**

**Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
Dinas Sosial, PprPA  
Kab. Pesisir Selatan**



**RIRI LOVITA, S.Si  
NIP. 19800106 200312 2 002**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama** : SITI HARIKSA AMALIA,  
**Jabatan** : Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama** : RIRI LOVITA, S.Sit  
**Jabatan** : Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**  
**Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

**RIRI LOVITA, S.Sit**  
**NIP. 19800106 200312 2 002**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Penelaah Teknis Kebijakan**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

**SITI HARIKSA AMALIA, S. Stat**  
**NIP. 19970916 202012 2 004**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya KAK dan PO pada Jafung PSM Data dan Informasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 Sub. kegiatan
2.	Melaksanakan administrasi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya Surat Keputusan (SK) pada Jafung PSM Data dan Informasi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 SK
3.	Pemantauan evaluasi, dan pelaporan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan pada pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 Sub. Kegiatan

**Pihak Kedua**  
**Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**



**RIRI LOVITA, S.Sit**  
**NIP. 19800106 200312 2 002**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**

**Penelaah Teknis Kebijakan**  
**Dinas Sosial, PprPA Kab.Pesisir Selatan**



**SITI HARIKSA AMALIA, S.Stat**  
**NIP. 19970916 202012 2 004**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : RONY EFFENDY**  
**Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : RIRI LOVITA, S.Sit**  
**Jabatan : Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**  
**Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

**RIRI LOVITA, S.Sit**  
**NIP. 19800106 200312 2 002**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Pengadministrasi Perkantoran**  
**Dinas Sosial, PprPA Kab.Pesisir Selatan**

**RONY EFFENDY**  
**NIP. 19771011 200701 1 004**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pada Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya KAK dan PO pada pada Jafung PSM Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6 Sub. kegiatan
2.	Melaksanakan administrasi di Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya Surat Keputusan (SK) pada Jafung PSM Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 SK
3.	Pemantauan evaluasi, dan pelaporan pada Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan pada Jafung PSM Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6. Sub. Kegiatan

**Pihak Kedua**  
**Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**



**RIRI LOVITA, S.Sit**  
**NIP. 19800106 200312 2 002**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Pengadministrasi Perkantoran**  
**Dinas Sosial, PprPA Kab.Pesisir Selatan**



**RONY EFFENDY**  
**NIP. 19771011 200701 1 004**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : KURNIA ASTRINI,**  
**Jabatan : Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : RIRI LOVITA, S.Sit**  
**Jabatan : Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Painan, 1 Juni 2025**  
**Pihak Pertama**

**Pihak Kedua**  
**Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

**Penata Kelola Pemberdayaan**  
**Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

**RIRI LOVITA, S.Sit**  
**NIP. 19800106 200312 2 002**

**KURNIA ASTRINI, S.Psi**  
**NIP. 19970905 202506 2 014**


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

No (1)	Sasaran Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya KAK dan PO pada Jafung PSM Data dan Informasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 Sub. kegiatan
2.	Melaksanakan administrasi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya Surat Keputusan (SK) pada Jafung PSM Data dan Informasi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 SK
3.	Pemantauan evaluasi, dan pelaporan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan pada pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 Sub. Kegiatan

**Painan, 1 Juni 2025  
Pihak Pertama**

**Pihak Kedua  
Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**

**Penata Kelola Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pesisir Selatan**



**RIRILOVITA. S.Sit  
NIP. 19800106 200312 2 002**



**KURNIA ASTRINI. S.Psi  
NIP. 19970905 202506 2 014**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : ADRIANI, S.ST**  
**Jabatan : Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si**  
**Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**  
**Kepala Dinas Sosial, PprPA**  
**Kab. Pesisir Selatan**

**(WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si)**  
**NIP. 19830119 200112 1 003**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Kepala UPTD Perlindungan Perempuan**  
**dan Anak**  
**Kab. Pesisir Selatan**

**(ADRIANI, S. ST)**  
**NIP. 19710605 199202 2 002**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	<b>Terwujudnya Keluarga Bahagia</b>		
	- Terlaksannya Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 layanan
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	40 layanan

No.	Program	Anggaran
1.	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>Rp. 80.549.900</b>
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota</b>	<b>Rp. 80.549.900</b>
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 80.549.900
2.	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Rp. 169.590.000</b>
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	<b>Rp. 169.590.000</b>
2.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp. 169.590.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 250.139.900</b>

Painan, 30 Januari 2025

**Pihak Kedua**  
**Kepala Dinas Sosial, PprPA**  
**Kab. Pesisir Selatan**



**WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si**  
**NIP. 19830119 200112 1 003**

**Pihak Pertama**  
**Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**  
**Kab. Pesisir Selatan**



**ADRIANI, S. ST**  
**NIP. 19710605 199202 2 002**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : ADRIANI, S.ST**  
**Jabatan : Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : RIDHA AMALIA MADYA, S.ST**  
**Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**  
**Kepala UPTD Perlindungan**  
**Perempuan dan Anak**

**ADRIANI, S. ST**  
**NIP. 19710605 199202 2 002**

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD**  
**Perlindungan Perempuan dan Anak**

**RIDHA AMALIA MADYA, S.ST**  
**NIP. 19761010 200701 2 005**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Menyiapkan dokumen Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten	Jumlah dokumen Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten	25 dokumen
	- Menyiapkan dokumen Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten	Jumlah dokumen Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten	40 dokumen

**Pihak Kedua**  
**Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**



**(ADRIANI, S. ST)**  
NIP. 19710605 199202 2 002

**Painan, 30 Januari 2025**  
**Pihak Pertama**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**



**(RIDHA AMALIA MADYA, S.ST)**  
NIP. 19761010 200701 2 005